

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Pembangunan zona integritas, kualitas pelayanan publik, persepsi anti korupsi dan kinerja organisasi di lingkungan perguruan tinggi negeri Tasikmalaya.

3.1.1 Sejarah Universitas Siliwangi

Universitas Siliwangi adalah universitas terbesar di Priangan Timur. Lembaga ini berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lulusannya agar dapat membantu kemajuan bangsa. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan mengirimkan dosen program magister dan doktor atau *short course* baik di dalam negeri maupun di luar negeri (di Belgia dan Australia), serta melalui kerja sama dengan institusi publik dan swasta lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak tahun 1996, warga Amerika bekerja di Unsil sebagai tenaga kerja asing dengan tujuan membantu mahasiswa dan dosen mengasah kemampuan bahasa Inggris mereka.

Sebagian besar staf pengajar di Unsil, atau sekitar 13.000 mahasiswa, kini memiliki gelar master atau doktor. Kampus Unsil kota seluas 6,9 hektar memiliki sejumlah fasilitas, antara lain pusat kegiatan mahasiswa, fasilitas olahraga, perpustakaan, praktikum, dan area penelitian untuk dosen dan mahasiswa yang luasnya sekitar 30 ha. 24 jenis forum atau kelompok kegiatan yang berbeda untuk organisasi mahasiswa dikelola dan diarahkan oleh Institut.

Universitas Siliwangi mengubah status kelembagaannya dari universitas swasta menjadi universitas negeri sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden Republik Indonesia.

3.1.2 Sejarah Singkat Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya

Secara historis cikal bakal UPI Kampus Tasikmalaya adalah SPGN Tasikmalaya yang pada mulanya merupakan SGB Negeri (berdiri tahun 1951) yang menyelenggarakan pendidikan setingkat SLTP untuk menghasilkan calon Guru SD. Mulai tahun 1956, SGA diselenggarakan untuk menghasilkan calon guru setingkat SLTP (SMP, ST, SMEP dan SGB). Tuntutan peningkatan kualifikasi yang mengharuskan calon guru SD minimal lulusan SGA, maka sejak tahun 1961 program SGB berakhir. SGA hanya berlangsung dari tahun 1961 hingga tahun 1964 karena terjadi perubahan kembali menjadi SPGN.

SPGN Tasikmalaya berlangsung dari tahun 1964 – 1991 yang memiliki fungsi utama menyelenggarakan pendidikan untuk calon guru SD dan TK. Pada akhir tahun ajaran 1991 SPG berakhir. Bersamaan dengan itu, status SPGN Tasikmalaya dari SLTA beralih fungsi menjadi Unit Pelaksana Program (UPP) FIP IKIP Bandung dengan nama Program D2 PGSD UPP Tasikmalaya. Pada tahun 1999, Presiden Republik Indonesia melalui Kepres Nomor 124 Tahun 1999 memutuskan perubahan IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia yang kini dikenal UPI. Seiring perubahan itu, Rektor UPI melalui surat keputusannya bernomor 1745/J.33/KL.02.04/2002, 27 Maret 2002, mengembangkan Program D2 PGSD UPP Tasikmalaya menjadi Universitas

Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Kampus-kampus UPI yang berada di daerah tersebut dipimpin oleh seorang Direktur. Sejak itu, Kampus Tasikmalaya mengalami dan mengikuti proses dinamika peralihan IKIP Bandung menjadi UPI pada tahun 1999 serta peralihan UPI menjadi UPI PT BHMN pada tahun 2004. Proses peralihan tersebut lebih memantapkan *core bussines* UPI Kampus Tasikmalaya dalam menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan calon guru SD dan PAUD (dulu PGTK).

UPI Kampus Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Dadaha no. 18 (Tlp.0265 – 331860 Kota Tasikmalaya 46115) saat ini (tahun akademik 2016/2017) dikelola oleh tata pamong yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi PGSD, Ketua Program Studi PGPAUD, Ketua Program Studi Kewirausahaan, Ketua Program Studi Bisnis Digital, Ketua Program Studi Desain Produk Industri, Ketua Program Studi Pascasarjana PGSD, Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian, serta Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan. Tata pamong tersebut saat ini mengelola Program Studi S1 PGSD, S1 PGPAUD, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Desain Produk Industri, dan Pascasarjana S2 PGSD dengan jumlah mahasiswa 1.025 orang. Jumlah mahasiswa tersebut dilayani dengan jumlah ruang kuliah yang dimiliki oleh UPI Kampus Tasikmalaya sebanyak 14 ruang kuliah dengan jumlah ukuran seluas 833,2 m², ditambah sebuah ruang sidang, sebuah aula dan dua perpustakaan serta sebelas ruang laboratorium yang difungsikan sebagai ruang kuliah.

3.1.3 Sejarah Singkat Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

Sesuai dengan Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kemenkes RI, maka dasar pemikiran pendirian Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya adalah: pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri. Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama SDM kesehatan bermutu yang berperan sebagai pemikir, perencana, pelaksana, penggerak dan pengawas pembangunan kesehatan.

Di era globalisasi masyarakat semakin kritis terhadap segala aspek, termasuk terhadap mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era keterbukaan ini. Perubahan dan perkembangan ini sangat memengaruhi orientasi pelayanan kesehatan dari pelayanan yang lebih bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat luas.

Implikasi perubahan orientasi pelayanan kesehatan adalah perubahan pendekatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan penyesuaian karakteristik maupun mutu SDM kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut. SDM yang bermutu hanya dihasilkan oleh institusi pendidikan tenaga kesehatan (diknakes) yang bermutu pula. Oleh karena itu, perlu dikembangkan upaya untuk meningkatkan kualitas diknakes melalui peningkatan kualitas manajemen institusi pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan

untuk meningkatkan kualitas manajemen institusi pendidikan adalah dengan mengembangkan organisasi dan tata laksana Politeknik Kesehatan (Poltekkes KemenKes RI).

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Politeknik KemenKes Kesehatan:

1. Kedudukan

Poltekkes KemenKes adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDM Kesehatan), dan dipimpin oleh seorang Direktur.

Direktur Poltekkes KemenKes dalam melaksanakan tugasnya secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan.

2. Tugas

Poltekkes KemenKes mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma III dan/ atau Program Diploma IV sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Politeknik KemenKes Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan.
- b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan.
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

- d. Pelaksanaan pembinaan Civitas Akademika dalam hubungannya dengan lingkungan.
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Survey Explanatory*, yaitu metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2018: 46).

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel yang akan diukur pengaruhnya yaitu Pembangunan Zona Integritas (X) sebagai variabel bebas terhadap Performa Pelayanan Publik (Y_1) dan Persepsi Anti Korupsi (Y_2) sebagai variabel terikat. Untuk menjelaskan operasionalisasi variabel dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	2	3	4
Pembangunan Zona Integritas (X)	Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan perguruan tinggi negeri di Tasikmalaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen perubahan 2. Penataan tatalaksana 3. Penataan manajemen SDM 4. Penguatan akuntabilitas kinerja 5. Penguatan pengawasan 6. peningkatan kualitas pelayanan publik 	Ordinal

1	2	3	4
Performa pelayanan publik (Y ₁)	Kualitas pelayanan publik mengacu pada semua kegiatan pelayanan yang diberikan oleh perguruan tinggi negeri Tasikmalaya dalam upaya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan memenuhi kebutuhan penerima pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan, 2. Kemudahan, 3. Kepastian, 4. Keadilan, 5. Profesionalisme Petugas, 6. Sarana Dan Fasilitas, 7. Keamanan, 8. Kompensasi 9. Sistem penanganan keluhan 	Ordinal
Persepsi Anti Korupsi (Y ₂)	Korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi di perguruan tinggi negeri Tasikmalaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Penilaian Integritas (SPI), 2. Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 3. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 	Ordinal
Kinerja Organisasi (Z)	Kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi perguruan tinggi negeri Tasikmalaya tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas 2. Kualitas Layanan 3. Responsivitas 4. Responsibilitas 5. Akuntabilitas 	Ordinal

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Interview yaitu dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu kepada mahasiswa/i.
2. Kuesioner yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada mahasiswa/i. Untuk memperoleh data yang akan dianalisis digunakan daftar pertanyaan/ pernyataan yang dapat berbentuk skala likert dengan komposisi

nilai positif dan negatif dengan alternatif jawaban sebagai berikut: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), KS (Kurang Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). Lebih jelasnya formasi nilai, notasi dan predikat masing-masing pilihan jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Skala Likert
Alternatif Jawaban, Skor Positif dan Skor Negatif

Alternatif Jawaban	Skor Positif	Skor Negatif
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Kurang Setuju	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

Sumber: Sugiyono, 2018: 87

3. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber yang ada dalam organisasi berupa buku-buku pedoman pembangunan zona integrasi serta terkait dengan pelayanan publik dan penuntasan korupsi serta kinerja yang terkait pula dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Dokumen yang diambil adalah dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

3.2.3 Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Riyani, 2021). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i aktif pada perguruan tinggi negeri di Tasikmalaya, yaitu:

Tabel 3.3
Distribusi Jumlah Mahasiswa/i Aktif di 3 (tiga) Perguruan Tinggi Negeri di Wilayah Tasikmalaya

No.	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa/i Aktif	Persentase
1	Universitas Siliwangi	17.465	77,67%
2	Universitas Pendidikan Indonesia	1.936	8,61%
3	Poltekkes Kemenkes	3.086	13,72%
Total		22.487	100

Sumber: data diolah, 2024.

Sampel penelitian adalah faktor dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018: 146). Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili).

Untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil agar mewakili seluruh populasi digunakan rumus Slovin sebagai berikut (Syahrir et al., 2020: 23).

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Di mana:

N = Populasi

n = Ukuran sampel

e² = standar error (e=5%)

Jadi untuk populasi (N) sebanyak 22.487 jumlah mahasiswa/i aktif yang diperoleh dari 3 (tiga) perguruan tinggi negeri di Tasikmalaya, dengan nilai kritis yang diinginkan (e) sebesar 5% maka ukuran sampel yang digunakan sebagai berikut.

$$n = \frac{22.487}{1+22.487(0,05)^2} = 393 \approx 400$$

Berdasarkan perhitungan sampel minimal di atas, maka dalam penelitian ini ditetapkan ukuran sampel sebesar 400 responden. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018: 133).

Berikut Detail jumlah mahasiswa/i aktif yang akan di jadikan sampel dari 3 (tiga) perguruan tinggi negeri di Tasikmalaya, sebagai berikut.

Tabel 3.4
Proporsional Sampel dari 3 (tiga) Perguruan Tinggi Negeri
di Tasikmalaya

No.	Nama Perguruan Tinggi	Persentase	Jumlah Anggota Sampel
1	Universitas Siliwangi	77,67%	311
2	Universitas Pendidikan Indonesia	8,61%	34
3	Poltekkes Kemenkes	13,72%	55
Jumlah			400

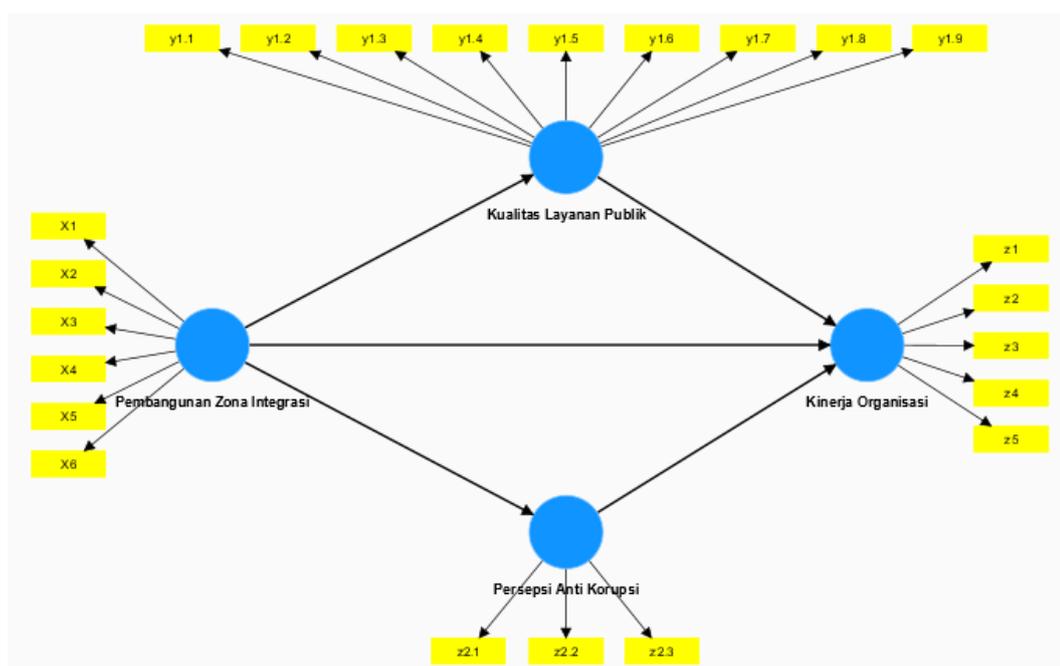
Sumber: Data diolah, 2024

Seperti yang telah dikemukakan bahwa, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dengan demikian kriteria pengambilan sampel sebagai berikut.

1. Responden adalah mahasiswa/i aktif di Perguruan Tinggi Negeri di Tasikmalaya;
2. Responden adalah mahasiswa/i yang bersedia untuk mengisi kuesioner.

3.2.4 Model Penelitian

Untuk mengetahui gambaran umum, berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat diketahui model penelitian mengenai pengaruh Pembangunan zona integritas terhadap performa pelayanan publik dan persepsi anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi negeri Tasikmalaya.



Gambar 3.1
Model Analisis Jalur

3.2.5 Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model

persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian. *Structural Equation Model* (SEM) adalah salah satu bidang kajian statistik yang dapat menguji sebuah rangkaian hubungan yang relatif sulit terukur secara bersamaan. SEM adalah teknik analisis *multivariate* yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan konstraknya, ataupun hubungan antar konstruk (Santoso, 2017).

PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis *covariance* menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model* (Ghozali dan Latan, 2012). Namun ada perbedaan antara SEM berbasis *covariance based* dengan *component based* PLS adalah dalam penggunaan model persamaan struktural untuk menguji teori atau pengembangan teori untuk tujuan prediksi.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik PLS yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap pertama adalah melakukan uji *measurement model*, yaitu menguji validitas dan reliabilitas konstruk dari masing-masing indikator;
2. Tahap kedua adalah melakukan uji *structural model* yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel/korelasi antara konstruk konstruk yang diukur dengan menggunakan uji t dari PLS itu sendiri.

3.2.5.1 *Measurement (Outer) Model (Uji Validitas dan Reliabilitas)*

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data penelitian. Untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas dari kuesioner tersebut maka peneliti menggunakan program *SmartPLS 4.0*. Prosedur pengujian validitas adalah *convergent validity* yaitu dengan mengkorelasikan skor item (*component score*) dengan *construct score* yang kemudian menghasilkan nilai *loading factor*. Nilai *loading factor* dikatakan tinggi jika komponen atau indikator berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan, *loading factor* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Ghozali dan Latan, 2012).

Reliabilitas menyatakan sejauh mana hasil atau pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan serta memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten setelah dilakukan beberapa kali pengukuran. Untuk mengukur tingkat reliabilitas variabel penelitian, maka digunakan koefisien alfa atau *cronbachs alpha* dan *composite reliability*. Item pengukuran dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien alfa lebih besar dari 0,6 (Ghozali dan Latan, 2012).

Analisa *outer model* dilakukan untuk memastikan bahwa *measurement* yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel) (Husein, 2011).

Ada beberapa perhitungan dalam analisa ini:

1. *Convergent validity* adalah nilai *loading factor* pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan $> 0,7$;
2. *Discriminant validity* adalah nilai *crossloading* faktor yang berguna apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai. Caranya dengan

membandingkan nilai konstruk yang dituju harus lebih besar dengan nilai konstruk yang lain;

3. *Composite reliability* adalah pengukuran apabila nilai reliabilitas $> 0,7$ maka nilai konstruk tersebut mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi;
4. *Average Variance Extracted* (AVE) adalah rata-rata varian yang setidaknya sebesar 0,5;
5. *Cronbach alpha* adalah perhitungan untuk membuktikan hasil *composite reliability* dimana besaran minimalnya adalah 0,6.

3.2.5.2 Structural (Inner) Model

Tujuan dari uji *structural model* adalah melihat korelasi antara konstruk yang diukur yang merupakan uji t dari *partial least square* itu sendiri. *Structural* atau *inner* model dapat diukur dengan melihat nilai *RSquare model* yang menunjukkan seberapa besar pengaruh antar variabel dalam model. Kemudian langkah selanjutnya adalah estimasi koefisien jalur yang merupakan nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural yang diperoleh dengan prosedur *bootstrapping* dengan nilai yang dianggap signifikan jika nilai t statistik lebih besar dari 1,96 (*significance level* 5%) atau lebih besar dari 1,65 (*significance level* 10%) untuk masing-masing hubungan jalurnya.

Pada analisa model ini adalah untuk menguji hubungan antara konstruksi laten. Ada beberapa perhitungan dalam analisa ini:

1. *R Square* adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Kriteria batasan nilai *R square* ini dalam tiga klasifikasi, yaitu 0,67 sebagai

substantial; 0,33 sebagai moderat dan 0,19 sebagai lemah (Chin dalam Sarwono, 2013);

2. *Prediction relevance (Q square)* atau dikenal dengan *Stone-Geisser's*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi seberapa baik nilai yang dihasilkan. Apabila nilai yang didapatkan 0.02 (kecil), 0.15 (sedang) dan 0.35 (besar). Hanya dapat dilakukan untuk konstruk endogen dengan indikator reflektif.

3.2.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 di tolak ketika t-statistik $> 1,96$. Untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a di terima jika nilai $p < 0,05$ (Husein, 2011). Apabila hipotesis penelitian tersebut dinyatakan kedalam hipotesis statistik maka:

$H_0 : \beta_1 = 0$, tidak terdapat pengaruh dari pembangunan zona integritas (variabel X) terhadap kualitas pelayanan publik (variabel Y_1).

$H_a : \beta_1 \neq 0$, terdapat pengaruh dari pembangunan zona integritas (variabel X) terhadap kualitas pelayanan publik (variabel Y_1).

$H_0 : \beta_2 = 0$, tidak terdapat pengaruh dari pembangunan zona integritas (variabel X) terhadap persepsi anti korupsi (variabel Y_2).

$H_a : \beta_2 \neq 0$, terdapat pengaruh dari pembangunan zona integritas (variabel X) terhadap persepsi anti korupsi (variabel Y_2).

Ho : $\beta_3 = 0$, tidak terdapat pengaruh dari pembangunan zona integritas (variabel X) terhadap kinerja organisasi (variabel Z).

Ha : $\beta_3 \neq 0$, terdapat pengaruh dari pembangunan zona integritas (variabel X) terhadap kinerja organisasi (variabel Z).

Ho : $\beta_4 = 0$, tidak terdapat pengaruh dari pembangunan zona integritas (variabel X) terhadap kinerja organisasi (variabel Z) melalui kualitas pelayanan publik (variabel Y_1).

Ha : $\beta_4 \neq 0$, terdapat pengaruh dari pembangunan zona integritas (variabel X) terhadap kinerja organisasi (variabel Z) melalui kualitas pelayanan publik (variabel Y_1).

Ho : $\beta_5 = 0$, tidak terdapat pengaruh dari pembangunan zona integritas (variabel X) terhadap kinerja organisasi (variabel Z) melalui persepsi anti korupsi (variabel Y_2).

Ha : $\beta_5 \neq 0$, terdapat pengaruh dari pembangunan zona integritas (variabel X) terhadap kinerja organisasi (variabel Z) melalui persepsi anti korupsi (variabel Y_2).

Kriteria uji:

- Ho di terima, jika $-t \text{ tabel} < t \text{ statistik} < t \text{ tabel}$
- Ho ditolak, jika $-t \text{ tabel} > t \text{ statistik} > t \text{ tabel}$

Pada tingkat signifikansi 0,05 (5%), maka nilai t tabel adalah 1,96.